

IMPLEMENTASI E-DESA NOW DI DESA WONOKOYO KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO

Usrotul Hasanah^{1*)}, Dina Yuli Ariyanti¹⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

*Email Korespondensi : uusstbond@gmail.com

ABSTRAK

E-Desa Now merupakan suatu data yang digunakan berdasarkan data di Kabupaten Situbondo dan data tersebut yang dilakukan secara partisipatif yang dilakukan oleh warga untuk mengidentifikasi golongan penduduk miskin. Aplikasi ini masih menyisakan masalah di lapangan seperti tidak samanya data laporan dengan data lapangan dan tidak transparannya data kepada publik. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi *E-Desa Now* di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Sedangkan hasil penelitian dari implementasi di Desa Wonokoyo sudah melakukan proses pendataan Analisis Kemiskinan Partisipatif dengan baik sesuai dengan delapan aspek. Karena pemerintah Desa Wonokoyo sudah melakukan pendataan sesuai dengan alur Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) yang sudah ditetapkan dalam PERBUP No. 3 Tahun 2017, kecuali dalam aspek uji publik di Desa Wonokoyo hanya dilakukan ditingkat desa saja, seharusnya uji publik dilakukan ditingkat RT/RW terlebih dahulu baru lanjut ditingkat dusun, lanjut lagi di tingkat desa, hingga yang terakhir ditingkat kecamatan. Dan juga dalam aspek penyepakatan, penyebaran, dan pemanfaatan hasil AKP di Desa Wonokoyo belum memampangkan hasil AKP di papan informasi desa.

Kata Kunci: Implementasi, *E-Desa Now*, Desa Wonokoyo

ABSTRACT

E-Desa Now is data that is used based on data in Situbondo Regency and this data is carried out in a participatory manner by residents to identify groups of the poor. This application still leaves problems in the field such as not the same as the report data with field data and the lack of transparency in the data to the public. The objective of this research is to know the implementation of *E-Desa Now* in Wonokoyo Village, Kapongan District, Situbondo Regency. Meanwhile, the research results from the implementation in Wonokoyo Village have carried out the participatory poverty analysis data collection process according to eight aspects. Because the Wonokoyo Village government has collected data in accordance with the AKP flow that has been stipulated in PERBUP No. 3 of 2017, except in the aspect of public testing in Wonokoyo Village it is only carried out at the village level, the public test should be carried out at the RT / RW level first, then at the hamlet level, then at the village level, until the last one at the sub-district level. And also in terms of agreement, dissemination, and utilization of PPA results in Wonokoyo Village, the results of the Participatory Poverty Analysis have not been posted on the village information board.

Keywords: Implementation, *E-Desa Now*, Wonokoyo Village

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA Situbondo selaku Sekretariat TKPKD menyusun Buku Pedoman Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) ini. Hal ini berdasarkan PERBUP Situbondo No. 99 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karna menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum.

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan pendataan di Tingkat Desa/Kelurahan berbasis semangat partisipatif, sehingga data yang diperoleh *valid* dan akurat. Terutama bagi daerah yang berkategori sebagai daerah tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menganggap data yang disusun dengan basis partisipatif memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang *valid*, diharapkan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan rasa keadilan rakyat. Kabupaten Situbondo dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal dalam skala Nasional, adalah Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat erat hubungannya dengan IPM (Indek Pembangunan Manusia, yang meliputi Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf) dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Adapun 5 kriteria dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo berdasarkan klasternya yaitu:

Tabel 1. 5 (Lima) Klaster Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo

NO.	KLASTER	JUMLAH
1.	Tidak Miskin	12.400
2.	Rentan Miskin	26.145
3.	Hampir Miskin	67.805
4.	Miskin	114.350
5.	Sangat Miskin	8.808
JUMLAH KESELURUHAN		229.508

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Situbondo, 3 Maret 2020)

Dari data tabel diatas jumlah Klaster penduduk miskin di Kabupaten Situbondo adalah 229.508 jiwa. Dalam melakukan observasi awal peneliti menemukan masalah dimana data AKP dan kondisi masyarakat yang ada di Desa Wonokoyo tidak sesuai dengan kenyataannya, ditambah lagi Kepala Desa Wonokoyo masuk dalam klaster miskin padahal kenyataannya Kepala Desa Wonokoyo bukan dari kategori klaster miskin, ada juga staff Desa Wonokoyo Anwar masuk dalam klaster miskin, Ahmad Baihaqi ketua dusun patek masuk dalam klaster miskin, abrori ketua RT dusun patek masuk dalam klaster miskin juga dan ada juga tokoh masyarakat Desa Wonokoyo yang masuk dalam klaster miskin padahal kenyataannya mereka bukan masuk dalam klaster miskin. Dari beberapa contoh sampel tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) membuat terobosan baru dengan meluncurkan sistem data berbasis partisipatif sebagai rujukan penanggulangan kemiskinan dimana di Kabupaten Situbondo jumlah kemiskinan masih tersisa 13%, maka Pemerintah membuat terobosan tersebut melalui Aplikasi *E-Desa Now* (Sistem Informasi Terpadu Perencanaan Partipatif Supra Desa) dalam menggunakan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). *E-Desa Now* merupakan suatu data yang digunakan berdasarkan data di Kabupaten Situbondo dan data tersebut yang dilakukan secara partisipatif yang dilakukan oleh warga untuk mengidentifikasi golongan penduduk miskin. Adanya *E-Desa Now* Pemerintah bisa mengontrol tingkat kemiskinan masyarakat, mulai dari sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin.

Dengan *E-Desa Now*, data kemiskinan bisa didapatkan dengan *valid*, sehingga kebijakan dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Aplikasi *E-Desa Now* di

resmikan langsung pada 28 Desember 2017 oleh Bupati Situbondo di Gedung Olahraga (GOR) Baluran Kabupaten Situbondo.

Aplikasi *E-Desa Now* adalah aplikasi supra struktur dimana keinginan Kabupaten Situbondo ingin mempunyai data tunggal di daerahnya, data ini juga diharapkan akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dari observasi awal dinas mempunyai data sendiri-sendiri sehingga data tersebut tidak sama di setiap dinas, dikarenakan adanya data yang berbeda-beda di setiap dinas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo kebingungan dalam menentukan data yang akurat dikarenakan di masing-masing dinas berbeda-beda datanya dan masih diragukan kebenarannya.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Situbondo berinisiatif untuk membuat data tunggal daerahnya sendiri sehingga bisa mempermudah dinas-dinas yang terkait untuk mengambil data yang sama dan terjamin kebenarannya. Dengan adanya aplikasi *E-Desa Now* ini Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki data tunggal di daerahnya sendiri sehingga dinas-dinas yang terkait memiliki data-data yang sama, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka semua data mengenai kemiskinan dan kependudukan di

Pelaksanaan Aplikasi *E-Desa Now* yang merupakan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) masih terdapat kekeliruan data, sehingga update data yang diharapkan belum tercapai. Peneliti mengambil sampel secara acak dengan membuka aplikasi *E-Desa Now* ternyata terdapat kekeliruan data masalahnya adalah tidak samanya data laporan dengan data lapangan, tidak transparannya data kepada publik, pengiriman data AKP ke pihak BAPPEDA lambat, terkendalanya gaji yang diperoleh setiap bulan dengan gaji Rp. 150.000 menjadi masalah dalam pendataan di desa-desa yang ada di Situbondo dikarenakan harus mendata satu persatu warga yang ada sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendata, jadi aparat desa mengerjakan pendataan dengan mengerjakan di atas meja sehingga hasil yang ada tidak seluruhnya benar dengan fakta yang ada dilapangan.

Dengan permasalahan yang ada dimana petugas yang mendata tidak mempunyai kompetensi tentang metode pengambilan data, sosialisasi yang ada juga kurang baik/*misskomunikation* antara desa dengan Ketua RT sehingga Ketua RT yang bersangkutan untuk mendata tugas rutinnnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan lagi saat input data tim dari desa tidak ada yang mengontrol sehingga data yang di dapatkan tidak tahu kebenarannya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Berdasarkan pada latar belakang yang ada maka dapat disusun rumusan masalah Bagaimana Implementasi *E-Desa Now* di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: "Untuk mengetahui Implementasi *E-Desa Now* di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo."

METODE PENELITIAN

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pembil kebijakan yang berasal dari Lembaga/Instansi Pemerintah, Kantor Desa Wonokoyo,. Data primer mencakup proses pengumpulan data dan penerapan program dan dampaknya.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data penunjang yang relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Masyarakat Data penunjang diperoleh dari laporan hasil penelitian terkait, jurnal, internet serta sumber-sumber lainnya. Data dianalisis dengan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi AKP di Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh TKPK Desa/ Kelurahan dengan melibatkan warga masyarakat di wilayah desa. Tahap ini bertujuan menjelaskan alur serta maksud dan tujuan AKP untuk mencapai kesepahaman warga tentang AKP itu sendiri. Selain itu, dalam proses sosialisasi di Tingkat Desa/Kelurahan inilah dilakukan pembentukan Tim AKP secara partisipatif.

Pembentukan Tim AKP Desa/Kelurahan merupakan tahap untuk menentukan orang-orang yang akan melakukan AKP. Menimbang hasil AKP adalah sebagai bahan penyusunan SPKD dan proses Musrenbang, maka Tim AKP Desa/Kelurahan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Desa/Kelurahan dengan mempertimbangkan proporsi gender dan inklusifitas.

a) Tim Pelaksana AKP

Tim Pelaksana AKP merupakan tim yang melaksanakan AKP. Tim ini terdiri dari perwakilan tiap RT dan Dusun/Kampung/Lingkungan di masing-masing Desa/Kelurahan dan satu orang koordinator Pendata Desa/Kelurahan dan Tim *Entry* Data.

b) Tim Pemantau AKP

Tim Pemantau AKP merupakan tim yang memantau pelaksanaan AKP. Tim ini terdiri dari perwakilan pejabat serta tokoh lokal/Desa/Kelurahan (bisa juga melibatkan unsur TKPK Kecamatan). Keberadaan Tim Pemantau AKP dimaksudkan agar pelaksanaan AKP berlangsung independen.

Pelatihan AKP Tingkat Desa/Kelurahan

Pelatihan AKP ini ditujukan pada tim pelaksana AKP dan tim pemantau AKP. Dalam proses ini diberikan pemahaman tentang proses AKP dan tahapan pelaksanaan AKP. Pada proses pelatihan inilah instrumen Rumah Tangga diperkenalkan sebagai salah satu instrumen untuk pelaksanaan AKP.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA hanya satu kali dalam setahun yaitu di Bulan Februari dimana pelatihan tersebut dilaksanakan dua hari, yang dilatih oleh BAPPEDA yaitu tim pendata dan tim *entry*. Setelah selesai dilakukannya pelatihan maka BAPPEDA seluruhnya melimpahkan wewenang kepada kecamatan dan desa untuk mendata AKP. Sedangkan pelatihan di Desa Wonokoyo dilaksanakan satu minggu di kantor balai Desa Wonokoyo. Karena dirasa waktu pelatihan dari BAPPEDA sangat singkat dan belum cukup maksimal sehingga Desa Wonokoyo melakukan sendiri pelatihan AKP, dan yang menjadi peserta dalam proses pelatihan AKP adalah tim pendata dan tim *entry*. Tim pendata dari Desa Wonokoyo terdiri dari 12 orang yaitu ada ketua RT setempat dan para pendata AKP yang sudah disiapkan oleh pihak Desa Wonokoyo. RT disini hanya ikut mendampingi tim pendata yang sudah disiapkan oleh pihak Desa.

Sosialisasi AKP di Tingkat Dusun/Lingkungan

Tahap sosialisasi AKP melibatkan warga masyarakat di wilayah dusun/ lingkungan. Tahap ini dilaksanakan oleh tim pelaksana AKP yang telah mendapatkan pelatihan. Tahap ini ditujukan untuk mensosialisasikan alur AKP, maksud dan tujuan AKP, serta mencapai kephahaman seluruh warga Desa Wonokoyo tentang AKP.

Berdasarkan hasil interview desa mensosialisasikan kembali apa saja yang telah disampaikan oleh BAPPEDA dalam proses pendataan AKP. Dalam sosialisasi di tingkat dusun di Desa Wonokoyo masyarakat ikut serta dalam sosialisasi, yang hadir hanya kepala desa, RT/RW, dan tim pendataan yang sudah dipilih oleh desa. Untuk Desa Wonokoyo sendiri tim pendataan ada 12 orang yaitu terdiri dari RT/RW dan tim pilihan dari desa. RT disini nantinya hanya mendampingi tim pendata dari desa dalam proses pendataan AKP.

Diskusi AKP lingkup Rumpun Rumah Tangga (RRT) atau Desa Wisma

Diskusi AKP lingkup RRT dilakukan oleh Tim Pelaksana AKP dengan dipantau oleh Tim Pemantau AKP. Dalam diskusi tingkat RRT inilah dilakukan diskusi pengisian instrumen Rumah Tangga. Selain pengisian instrumen dilakukan juga proses pemetaan penyebab kemiskinan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pemilihan lingkup RRT sebagai tempat pengisian Instrumen Rumah Tangga dikarenakan merupakan lingkup terkecil dan akan memudahkan proses untuk saling memberikan verifikasi.

Diskusi AKP ini dilaksanakan di kantor Desa Wonokoyo dengan dihadiri oleh kepala desa, RT/RW, tim pendata dan tim *entry*, yang dibahas adalah diskusi mengenai pengisian instrument rumah tangga, selain pengisian instrument rumah tangga biasanya juga melakukan pemetaan tersendiri terhadap warganya, dimana warga tersebut masuk dalam klaster miskin atau klaster tidak miskin, dan diskusi ini biasanya melihat dari hasil AKP tahun sebelumnya sehingga data tersebut nantinya bisa di *verifikasi*. Pada saat diskusi inilah tim pelaksana pendata AKP akan membawa *list* data yang nantinya akan diisi oleh tim pendata untuk mendata warga desa yang ada.

Pemaduan data (Data entry) Hasilpendataan kedalamSID

Setelah proses di lapangan dilakukan dan data diperoleh, maka isian Instrumen Rumah Tangga di-*entry* dalam Sistem Informasi Desa (SID). Hasil ini akan menjadi bahan uji publik. Pemaduan data *entry* disini dimana jika tim pendata sudah selesai melakukan tugasnya yaitu pendataan AKP dilapangan, maka langkah selanjutnya adalah proses *pengentryan* data dimana *pengentryan* data ini dilakukan oleh tim *entry*, tugas tim *entry* ini yaitu memasukkan data-data yang sudah diberikan oleh tim pendata, Lalu tim *entry* memasukkan data tersebut kedalam aplikasi khusus desa yaitu Sistem Informasi Desa (SID) jika sudah di *entry* kedalam aplikasi SID maka nanti akan keluar hasilnya dan hasil tersebut akan di *print out* dan dibuat acuan/bahan untuk dilakukannya uji publik.

Uji Publik Hasil AKP Tingkat Dusun/Lingkungan

Setelah data diperoleh maka proses selanjutnya masuk pada tahap uji publik. Uji publik ini dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi dan juga mendapatkan kesepakatan bersama atas hasil pendataan. Proses uji publik ini dilakukan oleh Tim Pelaksana AKP Desa/Kelurahan dan Tim pemantau AKP yang diselenggarakan di Tingkat Dusun/Lingkungan.

Uji publik hasil AKP dimana yang menjadi pemandu dalam uji publik adalah kepala desa dengan dihadiri oleh RT/RW, BPD dan Tim TKPK Kecamatan. Untuk uji publik di Desa Wonokoyo ini dilaksanakan di tingkat desa, bertempat di kantor Desa Wonokoyo. Di Desa Wonokoyo ada dua uji publik yang dilakukan, yang pertama uji publik di *print out* dari data AKP tahun 2018 yang kemudian *divalidasiasi*, dari hasil *validasi* kemudian di *entry* kembali oleh tim *entry*. Selanjutnya nanti akan ada uji publik lagi dari data yang sudah di input. Jika sudah uji publik yang kedua ini dirasa *fix* dan sudah *valid* maka nanti akan ditetapkan dengan kesepakatan BPD dan Kepala Desa, lalu Kepala Desa akan membuat SK data AKP 2019 kemudian data tersebut akan langsung dikirim ke BAPPEDA.

Penyepakatan, penyebaran dan pemanfaatan hasil akhir AKP

Setelah dilakukan uji publik dan hasil AKP disepakati sebagai rekomendasi uji publik, maka hasil AKP diusulkan oleh TKPK Desa/Kelurahan untuk disahkan dengan SK Kepala Desa/Lurah. Hasil AKP ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dari Tingkat Kabupaten sampai Desa/Kelurahan, mulai dari SPKD, RPJMD, Renstra PD, RenjaPD, Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, RPJMDes, dan RKP Desa.

Penyepakatan, penyebaran dan pemanfaatan hasil AKP dimana data yang sudah *dientry* di Desa Wonokoyo sudah cukup baik karena tim pendata dan tim *entry* sudah

bekerja secara maksimal sehingga pihak desa sudah cukup puas dengan hasil yang diperoleh. Pihak desa disini tidak memampang hasil AKP di kantor desa dikarenakan waktu yang sangat mepet/singkat untuk hasil AKP diserahkan ke pihak BAPPEDA. Sehingga setelah dilaksanakannya uji publik dan hasilnya sudah disepakati oleh RT/RW, kepala desa, BPD dan juga kecamatan maka data itu langsung di SK kan oleh kepala desa. Setelah dibuatkan SK oleh kepala desa maka hasil AKP Desa Wonokoyo langsung dikirim ke BAPPEDA. Sehingga untuk pemanfaatan hasil akhir data AKP inilah yang nantinya bisa membantu masyarakat miskin yang ada di Desa Wonokoyo agar nantinya bisa mendapatkan bantuan tepat sasaran dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa.

Monitoring dan Evaluasi Proses Pelaksanaan AKP

Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan AKP dilakukan oleh TKPKD Kabupaten, dalam hal ini Pokja Data TKPKD. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan AKP dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan AKP ditahun berikutnya.

Monitoring dan evaluasi yang melakukan monitoring dari pihak kabupaten ke kecamatan adalah Bupati dan Sekdes, sedangkan monitoring dari kecamatan ke desa adalah tim TKPK Kecamatan, sedangkan untuk desa sendiri ada kepala desa yang memonitoring bawahannya. Sejauh ini monitoring sudah dilakukan cukup baik dari pihak kabupaten, kecamatan maupun desa. Diharapkan dari Desa Wonokoyo nantinya Desa Wonokoyo ingin memiliki tim pendata dan tim *entry* yang *professional* sehingga Desa Wonokoyo nantinya memiliki tim ahli dalam dibidangnya yaitu dalam pendataan AKP, selain itu Desa Wonokoyo juga mengharapkan agar proses pendataan AKP nantinya bisa cepat selesai agar Desa Wonokoyo bisa memberikan pelayanan yang cepat dan baik untuk warganya.

KESIMPULAN

Dalam implementasi di Desa Wonokoyo sudah melakukan proses pendataan AKP dengan baik sesuai dengan delapan aspek. Karena pemerintah Desa Wonokoyo sudah melakukan pendataan sesuai dengan alur AKP yang sudah ditetapkan dalam PERBUP No. 3 Tahun 2017, kecuali dalam aspek uji publik di Desa Wonokoyo hanya dilakukan ditingkat desa saja, seharusnya uji publik dilakukan ditingkat RT/RW terlebih dahulu baru lanjut ditingkat dusun, lanjut lagi di tingkat desa, hingga yang terakhir ditingkat kecamatan. Dan juga dalam aspek Penyepakatan, penyebaran, dan pemanfaatan hasil AKP di Desa Wonokoyo belum memampangkan hasil AKP di papan informasi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada :

1. Kemenristek/BRIN yang telah memberikan bantuan pendanaan penelitian
2. Rektor UNARS
3. Pemerintah Desa Wonokoyo

REFERENSI

- [1] Amirin, Tatang M. 2003. Pokok- Pokok Teori Sistem. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [2] Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya. PT. Refika Aditama. Bandung.
- [3] Idochi, Anwar. 2009. Pengembangan Sistem Informasi di Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- [4] Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Andi Offset. Yogyakarta.
- [5] Jalaludin, Asep. 2011. Modul Sistem Infomasi Manajemen.
- [6] Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Andi Offset. Yogyakarta.
- [7] Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2004. Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi- Organisasi Publik. UGM Yogyakarta.
- [8] McLeod, Raymond dan P. Schell, George. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Salemba Empat. Jakarta.
- [9] Rianto, Budi dan Tri Lestari. 2012. Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Putra Media Nusantara. Surabaya
- [10] Rusdiana, dan Moch. Irfan. 2014 Sistem Informasi Manajemen. CV Pustaka Setia. Bandung.
- [11] Rochaety, Eti dkk. 2011. Sistem Informasi Manajemen. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- [12] Santosa, Panji. 2012. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. PT. Refika Aditama. Bandung.
- [13] Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta
- [14] Yusup, Pawit M dan Priyo Subekti. 2010. Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrieval). Kencana. Jakarta.

